



MEMAKNAI SPIRIT MISI PELAYARAN CHENG HO SEBAGAI MEDIA INTEGRASI SOSIAL ETNIK TIONGHOA DI INDONESIA YANG BERDIMENSI MULTIKULURALISM

Eko Punto Nugroho ^a

^aDosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
eko.ipung@gmail.com

Abstrak

Kedatangan Laksama Cheng Ho ke Indonesia di masa lalu dengan persahabatan sebenarnya telah meletakkan dasar hubungan yang sangat harmonis antara etnis-etnis di Indonesia dengan etnis Cina. Pendekatan multikulturalisme akan menjadi tawaran strategis untuk mengubah model pendekatan lain yang pernah ada. Dengan mengambil semangat perjalanan Cheng Ho, pendekatan ini adalah model baru yang baik tetapi belum diuji, pemerintah harus secara bijaksana mengadopsi kebijakan kewarganegaraan yang bijaksana dengan menyediakan fasilitas untuk infrastruktur seperti seruan moral, dorongan atau dalam bentuk undang-undang yang kondusif. Walaupun nanti akan terjadi proses akulturasi atau asimilasi biar terjadi sendiri dan tidak bisa dipaksakan.

Kata kunci: Cheng Ho, diskriminasi, harmonis, multikulturalisme, Tionghoa

Abstract

The arrival of Laksama Cheng Ho to Indonesia in the past with friendship has actually laid the foundations of a very harmonious relationship between ethnic-ethnic in Indonesia with ethnic Chinese. A multiculturalism approach would be a strategic bid to change other approach models that once existed. By taking the spirit of Cheng Ho's voyage, this approach is a good new model but not yet tested, the government should wisely adopt a wise civic policy by providing facilities for infrastructure such as moral appeals, encouragement or in the form of conducive legislation. Even if later will happen acculturation process or assimilation let happen by itself and can not be forced.

Keywords: Cheng Ho, discrimination, harmonious multiculturalism, Tionghoa

PENDAHULUAN

Tidak berlebihan apabila banyak orang memberikan penghargaan yang begitu tinggi terhadap mendiang Laksamana Cheng Ho, karena memang begitu besar jasa-jasanya bagi berbagai negara dan masyarakat di kawasan Asia khususnya. Bagaimana tidak, Ia adalah seorang pejabat tinggi kekaisaran Cina dari Dinasti Ming yang cukup berpengaruh di kawasan Asia, pernah menjalankan misi persahabatan dengan berbagai negara di kawasan Asia dan Afrika di masa lampau, dengan misi pelayarannya yang spektakuler. Barangkali melalui pelayaran Cheng Ho dalam misi persahabatan ini telah menyebabkan hubungan yang cukup akrab antara masyarakat Cina dengan berbagai masyarakat di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, dan akhirnya banyak warga Cina yang kemudian bersahabat serta menetap di kawasan ini mengembangkan diri dan hidup bersama-sama masyarakat setempat hingga sekarang (Yuanzhi, 2015).

Kiranya peringatan 600 tahun pelayaran muhibah Cheng Ho yang diadakan di Semarang beberapa tahun silam memiliki nilai strategis guna mendorong proses pembauran sesungguhnya, ataupun mengembalikan hubungan yang sangat manis antara etnik Cina dengan etnik lainnya di Indonesia dimasa lampau. Waktu itu armada yang dipimpin Cheng Ho mengadakan kunjungan muhibah dan perdagangan ke banyak negara, termasuk Indonesia dalam jumlah yang cukup besar, namun sebenarnya hanya merupakan salah satu dari misi pelayaran perdagangan dan persahabatan orang-orang Cina dengan orang Indonesia, sebab peristiwa seperti ini sudah muncul sejak awal abad masehi, yang memunculkan tokoh-tokoh legendaris seperti pendeta I-Tsing dari dinasti Sung (Yuanzhi, 2015; Poesponegoro II, 1984).

Semangat hubungan politik dan perdagangan yang sangat manis antara kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa lampau dengan kekaisaran Cina serta negara-negara lain di kawasan Asia selama lebih dari seribu tahun, dapat dihidupkan kembali untuk memberikan roh terhadap hubungan politik juga ekonomi antar negara tersebut pada saat ini. Sebagian dari jalur-jalur hubungan dagang dan politik yang legendaris di masa lalu tersebut dapat dihidupkan lagi sebagai jalur kegiatan pariwisata atau napak tilas peristiwa historis.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejarah telah mengubah keadaan khususnya di Indonesia, sejalan dengan adanya politik diskriminasi etnik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintahan Orde Baru, maka orang-orang Cina yang semula berbaur akrab dengan penduduk Indonesia mulai merenggang akibat terjadi banyak konflik. Tragedi Mei 1998 di Jakarta adalah suatu bencana besar yang sulit dilupakan oleh warga Indonesia keturunan Cina. Peristiwa yang menyebabkan ratusan warga keturunan Cina meninggalkan Jakarta itu merupakan suatu bukti ketidakharmonisan hubungan antar etnik dibalik jargon-jargon keberhasilan proses pembauran dan keharmonisan sebelumnya. Tampaknya, pemerintah Orde Baru waktu itu menerapkan standar ganda, di satu sisi pengembangan keragaman budaya, etnik, agama dan semua yang tergolong dalam SARA menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah, namun di sisi lain justru keragaman itu sering dicurigai sebagai salah satu faktor yang mengancam stabilitas nasional. Hal ini muncul sebagai akibat dari pendekatan politik yang berlebihan, dan akibatnya tidak terduga sama sekali. Tidak hanya masalah yang menyangkut etnik Cina, tetapi rentetan kejadian berikutnya mulai dari peristiwa Sambas, Ambon, dan Sampit merupakan akibat dari kebijakan yang “berkepribadian ganda” itu. Program-program pemerintah Orde Baru waktu itu menekankan pada stabilitas dan keamanan terbilang memang cukup efektif selama 32 tahun untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi ternyata “semu”, sebab akibatnya justru memporak-porandakan tatanan yang sudah mapan, diawali dari peristiwa Mei 1998 dan kejadian-kejadian berikutnya. Tulisan ini adalah suatu hasil kajian dan rangkuman dari pustaka-pustaka baik yang bersifat primer berupa tulisan kuno, naskah-naskah (babad), maupun yang bersifat sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang bersifat teoretis maupun interpretatif atas data dari para pakar dibidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Historis

Bila kita tengok kemasa lampau sekitar abad 15-16, ternyata orang-orang Cina cukup berperan dalam proses Islamisasi di Indonesia, dan khususnya di Jawa. Bukti-bukti akan hal ini cukup banyak dijumpai pada kronik dan peninggalan sejarah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peranan Cheng Ho dan Mahuan 600 tahun yang lalu merupakan bukti historis, sedangkan peninggalan seperti Kelenteng Sam Po Khong, makam Puteri Cina dan berbagai ornamen Cina yang ditemukan di Masjid Agung Demak, masjid-masjid kuno dan peninggalan Islam lainnya merupakan bukti-bukti arkeologis yang menandai proses itu. Hubungan politik dan perdagangan Cina-Arab baik melalui darat atau laut dimasa lampau yang secara legendaris disebut dengan jalur sutera itu, kiranya telah mendorong proses Islamisasi di Indonesia. Begitu dekatnya hubungan orang-orang Cina dengan orang Islam dimasa lalu tampaknya sangat bertolak belakang dengan apa yang terlihat sekarang. Mungkin hal ini merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru sejak masa sejarah hingga masa sekarang, perlu kiranya dicermati bersama-sama untuk diadakan perubahan-perubahan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Hubungan yang harmonis antara orang-orang Cina dengan orang Indonesia melalui jalur pelayaran sebenarnya secara teoretis sudah berlangsung sejak awal tahun masehi, walaupun bukti-bukti historis baru diketahui sejak abad kelima masehi dengan menyebutkan kunjungannya sebuah kerajaan To-lo-mo (Taruma Negara), sebuah kerajaan yang pernah ada di Jawa Barat pada abad kelima masehi. Orang-orang Cina ketika berlayar sampai di kawasan Nusantara selalu menuliskan catatan perjalanannya dalam kronik (berita) Cina. Khusus catatan perjalanan ke Malaysia dan Indonesia diterjemahkan dan dibahas oleh W.P. Groenevelt (1960) dalam bukunya yang berjudul "*Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*". Dalam buku ini disebutkan dengan lafal Cina berbagai tempat, kerajaan dan nama-nama raja yang pernah ada di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan politik dan perdagangan yang harmonis antara para pelayar dari negeri Cina dengan masyarakat Indonesia sudah berlangsung sejak sangat lama, dan hampir tidak pernah terjadi konflik. Barangkali memang politik memperluas pengaruh para Raja dari berbagai dinasti kekaisaran di negeri Cina utamanya tidak dilakukan melalui kekuatan senjata dan militer, tetapi melalui diplomasi persahabatan. Karena itu berbagai kerajaan yang pernah ada di Indonesia selalu menghargai kebesaran kaisar-kaisar di negeri Cina, dengan selalu mengirimkan utusannya secara periodik untuk menghadap Kaisar di negeri Cina sebagai tanda penghormatan dan pengakuan. Satu-satunya konflik yang pernah terjadi adalah pada jaman Raja Kertanegara dari Singasari, sebab Ia telah menyiksa Meng-Chi, seorang utusan Kaisar Khubilai Khan, dan akhirnya pada waktu itu tentara Cina mengirimkan pasukannya untuk menghukum Jawa (Poesponegoro II, 1984).

Catatan yang cukup penting untuk disimak, Kerajaan Sriwijaya (di Sumatra) merupakan *partner* kegiatan perdagangan kekaisaran Cina, tetapi Sriwijaya juga merupakan salah satu pusat Agama Budha di Asia, buktinya seorang pendeta Budha I-Tsing asal Cina yang selalu mondar-mandir ke India-Cina, selalu mengunjungi Sriwijaya untuk memperdalam pemahaman Agama dan menerjemahkan bahasa sanskerta ke dalam bahasa Cina di sana. Selain itu Ia menyebutkan pada akhir abad ketujuh masehi banyak pendeta Budha dari negeri Cina yang belajar Agama Budha di Sriwijaya untuk persiapan melanjutkan pelajarannya di Universitas Nalanda di India. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya ini, Indonesia sudah dianggap sebagai mitra dagang yang sejajar dengan kerajaan di Arab, di negeri Cina dan lain-lain. Mata dagangan dari Indonesia yang berupa emas, perak, rempah-rempah, kayu cendana, minyak wangi, gading gajah, rotan dan sebagainya, merupakan komoditas dagang yang bernilai tinggi yang selalu dibutuhkan oleh negara-negara lain (Poesponegoro II, 1984).

Dari uraian di atas diketahui bahwa Cheng Ho bukan satu-satunya tokoh dalam hubungan politik dan perdagangan antara kekaisaran Cina dengan negara-negara di Asia. Namun demikian

Cheng Ho merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam melembagakan hubungan ini, sebab ia telah melakukan tujuh kali pelayaran ke Asia Tenggara dengan membawa armada yang cukup besar (600 kapal). Adapun tempat-tempat penting yang sering dikunjungi oleh armada Ceng Ho adalah Gresik, Tuban, Majapahit, Semarang, Palembang dan Samudera Pasai, selain itu juga masih banyak tempat lain yang dikunjungi.

Cheng Ho beserta pembantu utamanya Ma Huan ternyata pemeluk Islam yang taat, walaupun tidak semua pengikutnya beragama Islam. Namun demikian sangat dimungkinkan Chen Ho ikut berjasa dalam proses Islamisasi di Indonesia. Mengenai hal ini kiranya diperlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut tentang peranan Cheng Ho dan tokoh-tokoh Cina lainnya dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Mengingat bukti-bukti tentang hal ini cukup kuat, sebab banyak keramik-keramik dan artefak dari negeri Cina tertempel di masjid-masjid kuno serta peninggalan-peninggalan Islam lainnya. Demikian halnya ada beberapa tokoh-tokoh penyebar Islam yang disinyalir keturunan Cina, seperti Raden Patah dan Sunan Ampel. Dalam sebuah sumber, ketika mengunjungi Majapahit, Ma Huan kemudian menceritakan bahwa masyarakat di kota Majapahit terdiri dari tiga golongan, yaitu orang-orang Cina Islam, orang-orang pribumi Islam dan orang-orang pribumi yang masih kafir. Dari sekian banyak pengikut Cheng Ho, diperkirakan ada yang kawin dan menetap di Indonesia, tak terkecuali yang beragama Islam. Kyai Jurumudi atau Dampoawang merupakan tokoh Islam yang menetap, mendirikan Masjid dan meninggal di daerah Simongan Semarang, dan sekarang tempat itu diabadikan menjadi Kelenteng Sam Po Kong (Yuanzhi, 2015; Poesponegoro III, 1984; Sunyoto, 2016).

Semenjak pelayaran Cheng Ho, berangsur-angsur orang-orang dari negeri Cina masuk secara bergelombang ke Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Hal ini dipicu oleh berbagai persoalan politik dan ekonomi kekaisaran Cina sepanjang sejarahnya. Namun mereka mampu berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat pribumi setempat. Di masa lalu orang-orang Cina juga mampu berbaur, menikah dan membina hubungan dengan masyarakat maupun pejabat-pejabat di Indonesia, Jawa khususnya, sehingga ada yang kemudian menduduki jabatan penting kerajaan. Raja Brawijaya V dari Majapahit menikah dengan seorang puteri Cina yang kemudian berputera Raden Patah, sebagai pendiri kerajaan Demak dan Sunan Ampel (anggota Walisongo), diperkirakan memiliki darah Cina, sepupu puteri Cina (Sunyoto, 2016).

Sunan Kuning yang petilasannya ada di Semarang Barat, adalah petilasan Raden Mas Garendi, Beliau salah satu Raja Mataram di Keraton Kartosuro yang bergelar Sunan Amangkuran V, yang membantu orang-orang Cina melawan VOC saat terjadi peristiwa Geger Pacinan. Peristiwa Geger Pacinan itu adalah perang besar yang meluas di Jawa yang terjadi pada tahun 1740-1743, merupakan puncak kerjasama antara orang-orang Cina dengan orang Jawa ketika harus melawan VOC. Kyai Sapujagat, sebuah meriam yang sangat besar ukurannya, yang sekarang ada di halaman Sitinggil kompleks Kraton Surakarta merupakan sebuah bukti adanya karya bersama antara orang Cina dan Jawa, yang kemudian digunakan bersama untuk melawan pasukan VOC. Akibat-akibat dari peristiwa pemberontakan besar tersebut, menyebabkan dilakukannya politik diskriminatif terhadap orang asing (khususnya Cina) dengan warga pribumi (Daradjadi, 2017; Hendro, 2017).

Selain Kelenteng Sam Po Kong, banyak petilasan, artefak maupun Kelenteng di Indonesia ini berkenaan dengan kehadiran armada Cheng Ho ini, misalnya yang ada di Surabaya, di Palembang dan di Rembang. Spirit armada Cheng Ho ini juga telah menginspirasi kalangan Islam Tionghoa di Indonesia untuk mendirikan masjid-masjid yang diberi nama Masjid Muhamad Cheng Ho, seperti di Surabaya, Pasuruan dan Purbalingga.

Integrasi Sosial

Siapakah sebenarnya orang Cina di Indonesia sekarang? pertanyaan sederhana ini tidak mungkin bisa dijawab secara gegabah. Menilik bahwa mereka ini sudah sangat berbeda dengan orang Cina yang ada di daratan Cina. Jauh sebelum abad XX, orang Cina yang datang di bumi

Nusantara telah mengasimilasikan diri dengan penduduk asli, bahkan pernah terjadi pada suatu periode mereka lebur dalam kehidupan penduduk asli, sehingga ciri-ciri mereka hilang sama sekali dan mereka larut menyatu dengan kebudayaan penduduk asli (Coppel, 1994:37).

Kala itu mereka yang datang kebanyakan laki-laki, yang kemudian menikah dengan wanita pribumi dari kalangan muslim, dan diperkirakan misi Cheng Ho yang mengawali peristiwa ini. Keturunan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Cina peranakan (Suryadinata, 1994:20), yang semestinya dibedakan dari Cina Totok. Ciri-ciri kaum Peranakan ini dapat dengan mudah dibedakan dari Cina Totok dari bahasa yang mereka gunakan. Kaum peranakan umumnya menggunakan bahasa daerah (Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) sebagai bahasa utama, sedangkan kaum Totok menggunakan bahasa Cina menurut sukunya, seperti Hokian, Tio Ciu, Hakka, Kanton, Hinghua, Hoklo, Hainan.

Masalah Cina pada hakekatnya bukanlah monopoli negara Indonesia. Akan tetapi dibandingkan dengan kejadian di negeri-negeri Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, apa yang dialami orang-orang Cina di Indonesia tergolong yang paling luar biasa. Berbagai tindak diskriminatif terhadap orang-orang Cina telah dilakukan oleh pemerintah sejak masa kolonial hingga sekarang. Di masa kolonial ada Undang-undang Agraria (1870) yang melarang orang-orang Asing (termasuk Cina) bergerak dibidang pertanian. Puncak tragedi orang Cina di Indonesia terjadi melalui pembantaian orang Cina oleh kompeni VOC tahun 1740 di Batavia, yang kemudian meluas menjadi Geger Pacinan atau Perang Cina di Jawa. Sementara itu perubahan situasi di Cina Daratan terbukti juga berpengaruh terhadap sikap dan orientasi orang Cina di Indonesia. Kebangkitan Nasional di Daratan Cina pada awal Abad XX, telah mendorong munculnya perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) di Hindia Belanda pada tanggal 17 Maret 1900, disusul berdirinya sekolah-sekolah dasar Tionghoa dengan sistem modern, dengan bahasa pengantar bahasa Mandarin. Lembaga-lembaga ini ternyata begitu efektif untuk “Men-Cinakan kembali” orang-orang yang disebut Cina peranakan (Ling, 2000:3).

Pada sisi lain pemukiman orang Cina terisolasi oleh pihak kolonial, sehingga terbentuk kampung-kampung Cina atau pecinan (*China Town*), ditambah stratifikasi sosial versi kolonial yang membagi masyarakat menjadi tiga kelas, yakni kelas satu untuk orang Eropa, kelas dua untuk orang-orang timur asing (termasuk Cina) dan pribumi sebagai kelas terendah.

Setelah Indonesia merdeka, sikap diskriminatif terhadap orang-orang Cina nampaknya masih terus berjalan, semisal adanya persetujuan antara Menlu RRC Chou En Lai dan Menlu RI Soenaryo mengenai penghapusan dwi kewarganegaraan, PP. No. 10 Tahun 1959 tentang larangan orang Tionghoa asing berusaha di luar ibukota Kabupaten, juga kebijakan pemerintah dibidang pendidikan yang “asimilasionis”, tujuan utamanya adalah mengurangi intensitas penggunaan bahasa Cina. Contoh lain ialah adanya peraturan KASAD bulan April 1958 yang menutup semua surat kabar yang terbit dengan huruf selain Latin dan Arab, juga adanya larangan/pembatasan penggunaan bahasa Cina di tempat-tempat terbuka dan mendesak WNI keturunan tidak lagi menggunakan bahasa Cina. Di masa Orde Baru, bahkan ada Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang intinya bahwa agama dan adat istiadat Cina hanya diijinkan dipraktekkan di lingkungan keluarga. Perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat walaupun akan dilangsungkan secara terbuka, tidak boleh dilakukan secara mencolok. Hal itu akan diatur oleh Departemen Agama dan Jaksa Agung. Baru dengan keluarnya UU No. 5/1969 maka Agama Budha dan Konghucu diakui memperoleh status resmi, walaupun dalam prakteknya berbagai pembatasan tetap diberlakukan. Masalah yang berbau diskriminatif lain dapat dilihat dalam larangan iklan dengan tulisan Mandarin, film dengan bahasa Mandarin, peraturan tentang perubahan nama dan lain-lain.

Di awal kemerdekaan, secara umum keberadaan orang Cina dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Pertama, adalah kelompok yang berorientasi ke Indonesia, dari kelompok ini banyak tokoh yang begitu gigih memperjuangkan terbentuknya *nation and character building* di Indonesia. Kedua, kelompok yang berorientasi ke Tiongkok, di antara mereka ini ada sekitar

40.000 orang Cina di tahun 1949 menolak tawaran kewarganegaraan pemerintah RI dan memilih pulang ke negeri leluhur. Ketiga, adalah kelompok Cina yang berorientasi ke Barat (Greif, 1991:11).

Walaupun pada saat ini barangkali sudah amat sulit untuk menemukan orang Cina Indonesia yang masih merasa bukan sebagai orang Indonesia, namun kenyataannya, keraguan etnik lain, khususnya kaum pribumi terhadap ke-nasionalan orang-orang Cina belum juga hilang. Sebaliknya dikotomi pri dan non pribumi telah menjadi komoditas yang sangat baik bagi isu-isu SARA sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga sekarang.

Walaupun banyak upaya telah dilakukan, baik oleh tokoh-tokoh pribumi ataupun sebaliknya dari kalangan non pri untuk membuktikan kesungguhan akan ke-Indonesia-annya, namun nampaknya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, yang dalam prakteknya justru menerapkan standar ganda terhadap orang-orang Cina. Di satu sisi khususnya sektor ekonomi orang-orang Cina diberi peluang, yang sebenarnya tidak lain juga demi kepentingan penguasa, pada sisi lain secara politik dan kultural mereka ditekan. Dampak kebijakan itu adalah adanya perbedaan sosial ekonomi yang begitu mencolok antara pri dan non pri, yang akhirnya bermuara pada munculnya kecemburuan sosial dan isu SARA serta memuncak pada tragedi Mei 1998.

Kompas (14 Maret 2001) pernah menulis bahwa semasa Orde Baru, potensi konflik SARA tidak boleh kelihatan dan memang disembunyikan di balik karpet "Persatuan dan Kesatuan". Bahkan kata SARA saja cukup ampuh untuk menyeret orang-orang ke penjara atas tuduhan subversi "memecah-belah", mengancam persatuan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan sebagainya. Semua itu membuat Orde Baru dari luar tampak ibarat rumah yang kokoh, tetapi sebenarnya "rayap" bernama SARA itu terus berkembang biak dengan subur dalam ketidakpuasan politik, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, kesewenang-wenangan, yang kemudian menggerogoti tiang-tiang penyangga, membuat rumah itu rapuh dan berpotensi roboh.

Terhadap etnik Cina dalam koridor SARA tersebut dan isu pembauran ternyata mereka mendapat tekanan yang cukup berlebihan dibandingkan etnik-etnik lain di Indonesia. Demikian kuatnya tekanan yang bermuatan politis, yang dikaitkan dengan isu komunis dan negara RRC, maka golongan etnik ini akhirnya menjadi cukup eksklusif. Dengan kekuatan sistem ekonominya yang tersisa (karena potensi sosial budaya dibekukan) akhirnya mereka masih mampu eksis di tengah masyarakat dan sering memunculkan kecemburuan sosial yang mendorong terjadinya konflik.

Persoalan pembauran yang dicanangkan sejak Orde Baru di sini diletakkan pada posisi yang salah, sehingga hanya menghasilkan orang-orang Cina yang berstandar ganda. Disatu sisi misalnya dengan merubah nama dan penampilannya mereka seolah-olah akomodatif terhadap program pembauran tersebut, namun di sisi lain perilaku mereka justru berpotensi konflik dengan etnik lainnya. Setelah konflik itu benar-benar terjadi mereka lalu mengeluh bahwa selama ini ternyata hanya dijadikan sebagai sapi perah oleh oknum-oknum yang berkedok pemerintah.

Semua hal di atas tentu dapat kita lihat bersama sebagai sebuah pelajaran yang amat berharga dan tentu supaya jangan terulang lagi, walaupun kita sekarang cukup sulit menghadapi masalah yang merebak tersebut di atas. Masalah proses difusi, akulturasi ataupun asimilasi sekalipun sebenarnya adalah suatu proses yang tentu tidak dapat dipaksakan, mungkin pihak pemerintah hanya dapat menyiapkan sarana ataupun prasarana untuk menjembatani agar proses-proses sosial budaya itu dapat berlangsung dengan baik. Hal ini disebabkan persoalan etnisitas itu mempunyai sifat etnosentrisme yang dapat memunculkan pandangan stereotip dan bentuk-bentuk konservatif lainnya. Kalau sudah demikian maka mustahil proses-proses akulturasi ataupun asimilasi dapat berlangsung dengan baik, dan kamufase-kamufase serta konflik-konflik yang akan muncul dalam skala kecil namun dapat mengarah pada konflik yang lebih besar.

Guna mewujudkan proses integrasi nasional yang permanen, maka pemerintah harus dapat mendorong terjadinya proses perubahan sosial budaya yang positif, yaitu sedikit demi sedikit harus dapat membuka sifat-sifat etnik yang cenderung konservatif dan tertutup itu untuk dapat saling berkomunikasi dengan baik. Masing-masing kelompok etnik harus dapat menyadari betul tentang adanya perubahan sosial budaya, bahwa mereka sekarang telah berada pada suatu kelompok yang merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Karena itu bentuk-bentuk perilaku yang konservatif dan eksklusif itu memang harus ditinggalkan.

Memang untuk suatu identitas dan kelangsungan adaptasi sosial budaya, sebuah kebudayaan masyarakat harus dikonservasi, namun yang lebih penting untuk pergaulan nasional dan internasional kebudayaan itu harus dikembangkan dan dikomunikasikan. Dewasa ini banyak didirikan pusat-pusat (pelestarian) kebudayaan, misalnya pusat kebudayaan Betawi, pusat kebudayaan Jawa, pusat kebudayaan Batak, Asmat dan sebagainya, namun masih perlu ditambah lagi untuk membentuk pernik-pernik kebudayaan nasional. Bagian vitalnya adalah, pusat-pusat kebudayaan tersebut harus dapat berfungsi menjembatani komunikasi sosial kebudayaan secara nasional, bukan sebaliknya, dengan sifat konservatifnya sehingga dapat memicu konflik.

Dengan demikian menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagaimana sebenarnya keberadaan orang-orang Cina di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Apakah peraturan yang diskriminatif dan standar ganda yang berlaku sejak jaman kolonial hingga masa Orde Baru masih tepat diberlakukan hingga sekarang, ataukah mungkin dihapuskan sepenuhnya?. Tentunya semua itu memerlukan wacana pemikiran yang komprehensif. Sejalan dengan era keterbukaan dimasa sekarang, barangkali peraturan yang diskriminatif itu harus dihapuskan, namun yang penting memang harus ada peraturan umum yang melindungi golongan yang terpinggirkan. Kenyataannya selama ini orang-orang Cina selalu menjadi korban kebijakan-kebijakan yang keliru. Masalah inilah yang mendasari ide untuk mereposisi keberadaan etnik Cina di dalam proses integrasi nasional yang mungkin dapat dilakukan melalui pendekatan multikulturalisme.

Diera Indonesia Baru sekarang, di mana pemerintah jelas-jelas sedang gigih mengupayakan agar Republik ini menjadi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, berkeadilan, demokratis, peduli akan HAM dan menyikapi perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, nampaknya kebijakan terhadap etnik Cina juga ditinjau kembali. Terbitnya Kepres No. 6 tahun 2000 merupakan angin segar bagi orang Cina yang selama era Orde Baru secara fisik maupun psikis telah menderita, karena dijauhkan dari segala anasir yang berhulu pada budaya leluhur mereka. Adanya kebijakan itu diharapkan membuat Naga Nusantara itu bangkit dari tidur panjangnya.

Dengan demikian era reformasi sesungguhnya lebih memberi peluang bagi semua pihak, tidak terkecuali etnik Cina, untuk membuktikan diri sebagai pewaris sah republik tercinta ini. Akan tetapi peluang baik ini tidak mustahil bisa menjadi hambatan proses integrasi, terutama jika kiprah mereka salah langkah sehingga tumbuh kesan bahwa orang Cina Indonesia justru semakin eksklusif. Untuk itulah proses *multiculturalism* terhadap etnik Cina di era Indonesia baru perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, agar upaya mensinergikan keanekaragaman potensi etnik dapat berjalan sesuai harapan.

Penelitian yang termasuk mutakhir dilakukan oleh Debora Wiriadinata berjudul “Chinese Indonesian Dilema : The Younger Generation of Chinese Indonesian, Search for Identity” yang dilakukan di empat kota besar, yaitu Surabaya, Bandar Lampung, Bandung dan Jakarta, telah menemukan dilema yang dihadapi oleh generasi muda Cina Indonesia. Sebagai orang Cina Indonesia umumnya mereka mengaku kebingungan untuk memilih, apakah akan tetap mempertahankan ciri kecinaan (keturunan) mereka yang khas, atau harus meninggalkan samasekali semua yang diperoleh dari leluhur mereka dan sepenuhnya melebur ke dalam masyarakat mayoritas. Disatu sisi mereka merasa bahwa sebagai WNI di tengah bangsa yang sebenarnya multi etnik ini, kebudayaan dan hak politik mereka telah diingkari. Namun di sisi lain, mereka bangga sebagai orang Cina, antara lain dikarenakan status ekonomi mereka yang tinggi,

sekalipun mereka tidak merasa terlindungi dari agresivitas kelompok mayoritas yang sewaktu-waktu dapat bergejolak.

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa mereka itu sebenarnya kuat, sebab berbagai tekanan yang mengecilkan atau meminggirkan mereka ditanggapi dengan penuh perjuangan sehingga mereka tampak semakin kuat dan tidak merasa terpinggirkan. Dari sinilah seharusnya mereka diberikan penghargaan atas prestasi dan jasa-jasanya sejak masa lampau, serta diberikan kesempatan untuk mengembangkan segala yang mereka miliki bersama-sama dan bahu-membahu dengan etnik lainnya, asal tidak mengarah pada eksklusifisme dan konservatifisme. Hal yang perlu dihapuskan sebenarnya adalah pandangan stereotip pada etnik Cina dan sebaliknya, yang tentu sangat tidak kondusif dan kontra produktif dimasa sekarang mengingat itu berpotensi memicu konflik sosial berkelanjutan.

SIMPULAN

Kedatangan Laksama Cheng Ho ke Indonesia dimasa lampau dengan penuh persahabatan sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar hubungan yang sangat harmonis antara etnik-etnik di Indonesia dengan etnik Cina. Keharmonisan hubungan tersebut turut mendorong masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, karena Cheng Ho dan beberapa anak buahnya adalah orang Islam yang beberapa di antaranya memutuskan untuk tinggal di Indonesia meneruskan syiar Islam, misalnya Kyai Dampo Awang yang memilih tinggal di Semarang, Beliau mendirikan masjid di sana, walaupun masjid ini sekarang berubah menjadi Kelenteng Sampo Kong.

Salah satu hasil dari kunjungan muhibah Cheng Ho ke Majapahit pada sekitar abad ke-15 adalah sikap keterbukaan Majapahit menerima kedatangan orang-orang Islam yang dibuktikan dengan ditemukannya kompleks makam Islam di dusun Troloyo Kecamatan Trowulan Mojokerto. Bahkan Raja Brawijaya V dari Majapahit juga memperistri seorang putri Cina yang beragama Islam dan berputera tokoh Islam Raden Patah yang akhirnya menjadi raja di Kerajaan Demak. Sunan Ampel yang makamnya sekarang ada di Ampel Denta Surabaya, adalah juga tokoh Islam sepupu putri Cina dari Negeri Cina yang diundang oleh raja Brawijaya untuk memperbaiki akhlak dan moral masyarakat Majapahit yang berada di Surabaya dan sekitarnya.

Hubungan baik Cina-Jawa berlanjut pada jaman kerajaan Demak dan Mataram, buktinya banyaknya keramik Cina yang menempel di Masjid Agung Demak. Juga bantuan penuh dari beberapa raja dan tokoh dari Kerajaan Mataram terhadap orang-orang Tionghoa yang saat itu (1740-1743) sedang bertempur melawan kompeni VOC pada peristiwa Geger Pacinan. Dengan adanya politik asimilasi dan diskriminasi etnik di era Orde Baru dan pemerintah sebelumnya, menghasilkan konflik-konflik sosial khususnya dengan etnik Cina yang berkepanjangan dan cukup memilukan, yang tentu dapat mengancam proses integrasi nasional.

Pendekatan *multiculturalism* kiranya merupakan sebuah tawaran strategis untuk mengubah model pendekatan lain yang pernah ada. Dengan mengambil spirit dari pelayaran Cheng Ho, pendekatan ini merupakan model baru yang cukup baik tetapi belum banyak teruji, maka pemerintah seyogianya merapkan politik kebudayaan yang arif dengan memfasilitasi baik berupa dukungan moral, atau dorongan dalam bentuk peraturan perundangan yang kondusif. Kalaupun nantinya akan terjadi proses akulturasi atau asimilasi biar terjadi dengan sendirinya dan tidak dapat dipaksakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, Abner (ed), 1974, *Urban Ethnicity*, London, New York, Sydney : Tavistock Publication.
Coppel, Charles A., 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Bisnis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Daradjadi, 2017, *Geger Pacinan 1740-1743*, Jakarta : Kompas.

- Greif, Stuart W. 1991. *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Groenevelt, W.P., 1960, *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*”, Djakarta : Bhratara
- Hendro, Eko Punto, dkk., 2017, *Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Sambernyowo*, Diterbitkan di Semarang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Kompas, 14 Maret 2001, *Asimilasionisme vs Multikulturalisme*, hal.6.
- Poesponegoro, Marwati Djoened (ed), 1984, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta : Balai Pustaka
- Poesponegoro, Marwati Djoened (ed), 1984, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta : Balai Pustaka
- Yuanzhi, Kong, 2015, *Cheng Ho Muslim Tionghoa : Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Disunting oleh HM Hembing Wijayakusuma.
- Sunyoto, Agus, 2016, *Atlas Walisongo*, Jakarta : Pustaka IIMaN.
- Suryadinata, Leo, 1994, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Ling, Tan Swie, 2000, *Peran Tionghoa di Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Makalah dalam Seminar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Jakarta.
- Wiradinata, Debora, 1998, *Chinese Indonesian Dilema: The Younger Generation of Chinese Indonesia, Search for Identity*, Thesis Ohio University.